



PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2025



TAHUN ANGGARAN 2024



Dispemdes@kotimkab.go.id



(0531) 21583



Dispemdes.kotimkab.go.id



Jl. Jendral sudirman km 6

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terselesaikan. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dimuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat diquantifikasi dan diukur. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun menggunakan indikator keluaran (*output*) dan (*outcome*) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kami berharap dokumen ini akan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih baik,

Sampit, Juli 2024
Kepala Dinas,

RAIHANSYAH, SH., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19750406 199902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	28
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA	
	42
 BAB V PENUTUP.....	56
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim TA.2023.....

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 DPMD Kab. Kotim..... 10

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Kotim..... 17

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 23

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan..... 29

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur 33

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 37

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 46



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Selanjutnya untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu tahun. Hal ini merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional RPJMD dan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun yang bersangkutan. Rancangan Rencana Kerja juga merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan diakhiri adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran



pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan RKPD tahun 2025 dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD Tahun 2025 ke dalam program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam satu tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035;



- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2024 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu sebagai acuan dan pedoman bagi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya

Adapun tujuan penyusunan RENJA DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Memudahkan pengendalian dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2. Agar penetapan kinerja lebih akurat sesuai dengan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
- 3. Memberikan pedoman dalam pencapaian sasaran dan target sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
- 4. Memudahkan pengevaluasian, tingkat capaian kegiatan, kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja SOPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja yang telah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SOPD, serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang :



1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RENJA

Berisikan uraian mengenai perbandingan program dan kegiatan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dalam melaksanakan program kegiatan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tertuang di dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar Rp 16.934.760.637,- dan Realisasi anggaran (per 31 Desember 2023) sebesar Rp.15.015526754,- atau capaian realisasi 88,67% sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran/ Keuangan dan Fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Belanja	16.934.760.637	15.015.526.754	88,67%
I	Belanja Operasi	16.201.994.877	14.405.427.256	88,91%
	Belanja Pegawai	6.266.264.843	5.344.484.498	85,29%
	Belanja Barang dan Jasa	9.385.730.034	8.510.942.758	90,68%
	Belanja Hibah	550.000.000	550.000.000	100,00%
II	Belanja Modal	732.765.760	610.099.498	83,26%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.739.400	311.135.174	95,52%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407.026.360	298.964.324	73,45%
	Capaian Kinerja Keuangan			88,67%

Selain berkaitan dengan capaian realisasi penyerapan anggaran pada Program dan Kegiatan tahun 2023, akan ditampilkan juga hasil evaluasi atau capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 serta prakiraan rekapitulasi renstra sampai dengan tahun 2024 berdasarkan pada outcome setiap program sesuai dengan Formulir Evaluasi Pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.



Berdasarkan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran, secara umum realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2023 telah sesuai dengan target memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada rencana strategis (renstra) 2021-2026. Hal tersebut didukung karena adanya komitmen cukup tinggi dari pemimpin dan SDM yang ada di DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan tugas dan pokok fungsinya dalam hal pemberdayaan masyarakat ke desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain faktor pendukung yang telah disebutkan, dalam pelaksanaannya dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pencapaian target program dan kegiatan di DPMD kotawaringin timur, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD dalam pencapaian indikator kinerja belum didukung dengan ketersediaan data-data yang memadai dan sistem kerja stakeholder pendukung secara optimal;
2. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur yang DPMD masih kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dibidang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga Berdampak Pada Kualitas capaian program dan kegiatan yang dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 maupun renja 2025, maka DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Strategi:

1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian kegiatan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal di DPMD.
4. Optimalisasi SDM aparatur yang ada dan mengusulkan penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK;
5. Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang tela ada dengan mengikutsertakan pada diklat– diklat maupun pembinaan–pembinaan karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan kinerja DPMD kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Aparatur Pemerintahan desa untuk mendukung ketersediaan data-data yang memadai sistem kerja stakeholder secara optimal.



Secara lebih rinci hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan renja 2023 dan capaian renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 dokumen	36 dokumen	15 dokumen	17 dokumen	83%	18 Dokumen	69 dokumen	79%
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0,44	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 pegawai	58 pegawai	30 Pegawai	32 pegawai	106%	30 Pegawai	120 Pegawai	73%
2	13	01	2.02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	66%
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	258 stel	86 stel	43 stel	46 stel	106%	43 stel	175 stel	68%
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	32 orang	16 orang	18 orang	113%	16 orang	66 orang	68,75%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24paket	8 Paket	4 paket	4 paket	100,00%	4 paket	16 Paket	66,66%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45.600 paket	22.800 paket	8000 paket	8050 paket	100,62%	8.000paket	38850 paket	85,19%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21.600 dokumen	7200 dokumen	3.600 dokumen	3680 dokumen	102,22%	3.600 dokumen	14480 dokumen	66,72%
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 paket	8 Paket	4 paket	4 paket	100,00%	4 paket	16 Paket	66,66%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 laporan	50 laporan	24 laporan	25 laporan	104,16%	24 laporan	99 laporan	68,75%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 laporan	815 laporan	400 laporan	405 laporan	98,75%	400 laporan	1620 laporan	67,50%
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	11 unit	1 unit	1 unit	4 unit	100%	2 unit	7 unit	63,63%
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 paket	3 Paket	5 paket	8 paket	160%	2 unit	13 paket	61,90%
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	7 unit	70%
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 unit	43 unit	9 unit	13 unit	144%	9 unit	65 unit	62,50%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.100 laporan	3000 laporan	1.350 laporan	1.365 laporan	100,00%	1.350 laporan	5715 laporan	70,55%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 paket	8 Paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	16 Paket	66.66%
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156 laporan	58 laporan	26 laporan	25 laporan	92,00%	26 laporan	109 Laporan	70%
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112 unit	11 unit	23 Unit	20 unit	86,00%	24 unit	55 unit	49%
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	22 unit	20 unit	20 unit	100%	24 unit	66 unit	55,00%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	4 unit	5 unit	3 unit	100%	5 gedung	12 unit	40,00%
0,33	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	342 unit	30 unit	57 unit	58 unit	60%	25 unit	113 unit	33,00%
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 unit	26 unit	25 unit	27 unit	108%	25 unit	78 unit	52,00%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	2			Program Penataan Desa	Presentase desa yang terselesaikan tata batas wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	persentase Desa yang telah dilakukan penataan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	6 desa	-	-	-	-	50 desa	-	-
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	120 desa	-	20 Desa	15 desa	-	20 desa	-	-
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	168 desa	1 desa	30 Desa	5 desa		50 desa	56 desa	33,33%
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 unit							
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase desa yang melakukan kerjasama terhadap total desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	102 dokumen	18 dokumen	17 dokumen	18 dokumen	105,88%	17 dokumen	53 dokumen	52%
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	11 dokumen	110,00%	10 dokumen	33 dokumen	55%
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1008 dokumen	336 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	672 dokumen	67%
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	50%
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	672 dokumen	67%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	672 dokumen	67%
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1200 orang	450 orang	200 orang	270 orang	135%	200 orang	920 orang	76,66%
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	24 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	100%	4 dokumen	18 dokumen	75,00%
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	245 laporan	-	77 laporan	77 laporan	100%	77 laporan	154 laporan	62,85%
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	60 laporan	-	-	-	-	10 laporan		16,66
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	672 dokumen	67%
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1008 dokumen	165 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	672 dokumen	67%
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 orang	130 orang	50 Orang	55 Orang	120%	50 orang	235 orang	78%
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	60 desa	-	10 Desa	1 Desa	10%	10 desa	11desa	18,33%
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1008 laporan	168 laporan	168 laporan	168 laporan	100%	168 laporan	504 dokumen	50%
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	67%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR						c			
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 lembaga	11 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga	21 lembaga	70,00%
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	120 dokumen	41 dokumen	20 dokumen	21 dokumen	95%	20 dokumen	82 dokumen	68,33%
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	67%
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	67%
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1218 dokumen	406 dokumen	203 dokumen	203 dokumen	100%	203 dokumen	812 dokumen	67%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 5 program dengan 12 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SKPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SKPD. Berikut ini merupakan tabel hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Timur

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM			7	8	8	9	70	-	8	9	
2	Persentase Desa yang Cepat Berkembang			5,36%	5,95%	7,00%	7,14	33,93%	-	7,00%	7,14	-
3	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik			100	100	100	100	100	-	100	100	-
4	% desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK			100%	100%	100%	100%	42,86%	-	100%	100%	-
5	% LPM aktif			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
6	Persentase LPM Berprestasi			0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,49%	-	0,54%	0,54%	-
7	% PKK aktif			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-
8	% posyandu aktif			40,00%	50,00%	55,00%	60%	26,18%	-	55,00%	60%	-



No	Indikator Tujuan dan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK			0,33	0,40	0,50	0,67	0,50	-	0,50%	0,67	-
10	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00%	-	1,00%	1,00	-
11	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes			20,27%	21,62%	22,30%	23,65	27,00%	-	22,30%	23,65	-
12	% BUMDes aktif			54,55%	55,84%	57,14%	58,44%	57,42%	-	57,14%	58,44%	-
13	% pasar desa aktif			100%	100%	100%	100%	66,23%	-	100%	100%	-
14	Nilai SAKIP			B	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	-
15	% pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-



Berdasarkan Tabel 2.3 tentang pencapaian kinerja DPMD Tahun 2023 terlihat bahwa dari 15 (lima belas) indikator kinerja terdapat 10 (sepuluh) indikator yang telah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditentukan dan 3(tiga) indikator yang tidak mencapai target. Untuk Indikator yang telah mencapai target diantaranya:

1. Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM
2. persentase desa yang cepat berkembang;
3. persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik
4. presentase LPM aktif;
5. persentase PKK aktif;
6. rata- rata jumlah kelompok binaan PKK;
7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat ;
8. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes;
9. Presentase BUMDes aktif;
10. Nilai SAKIP; dan
11. Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP;

Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai diantaranya adalah:

1. Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
2. presentase LPM berprestasi;
3. persentase pasar desa aktif

Capaian kinerja indikator desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK adalah sebesar 63,33% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 63,33 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK terhadap pengelolaan keuangan di desa, dimana dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 30 desa yang menjadi *sample* untuk tahun ini hanya dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat/BPK/ BPKP, baru 22 desa yang menindaklanjuti temuan.

Capaian kinerja indikator sasaran presentase LPM Berprestasi 0,49% dari Target 0,54% sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 0% dengan kata lain belum memenuhi target. Dikarenakan untuk tahun 2023 tidak ada dilaksanakan lomba lomba untuk LPM.

Sedngkan untuk indikator presentase pasar desa aktif yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 66,67%. sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,67%. Belum terpenuhinya target capaian indikator pasar desa aktif dikarenakan kapasitas SDM pengurus/ Pengelola pasar desa yang masih rendah, sehinggga aperlunya peningkatan dalam pembinaan. Meskipun tidak mencapai target akan tetapi ada peningkatan jumlah pasar desa yang aktif. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pasar Desa Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapaun yang menjadi dasar penilaian Pasar Desa Aktif, sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan
- b. Kepengurusan sesuai dengan ketentuan
- c. Terdapat agenda rutin pertemuan

Berdasarkan data bahwa Pasar Desa telah terbentuk di semua Desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 sebanyak 78 Pasar Desa, sedangkan pasar desa yang aktif hanya 52 pasar desa. Data Pasar Desa tersebut dari hasil penyerahan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Desa dan hasil kegiatan PNPM.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perencanaan, realisasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa terkait pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang terjadi terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, selain permasalahan tersebut terdapat juga permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait desa yang perlu ditangani, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa, minimnya sarana dan prasarana di Desa, dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.



Dari telaahan pencermatan internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diidentifikasi kekuatan serta kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa; dan
- d. Tersedianya pegawai yang berpengalaman dalam tugas/pekerjaan.

2. Kelemahan

- a. Kuantitas pegawai yang kurang sehingga kurang mendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat kinerja organisasi; dan
- c. Belum tersedianya sistem informasi data.

Sedangkan dari telaah dan pencermatan eksternal organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kab. Kotim dapat diidentifikasi peluang serta ancaman atau hambatan sebagai berikut:

1. Peluang

- a. Di berbagai sektor pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pola pikir yang dapat diterima. Dengan semakin meluasnya pola pendekatan pemberdayaan, semakin mempermudah DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Tersedianya kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dan kelurahan;
- c. Adanya regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014;
- d. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih dimiliki oleh masyarakat; dan
- e. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.

2. Ancaman/Hambatan

- a. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat tinggi;
- c. Belum optimalnya infrastruktur desa; dan
- d. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, memperhatikan hasil telaahan dan analisis, serta mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi DPMD pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan isu-isu strategis DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum optimal;



2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
3. Kurang berkembangnya lembaga perekonomian desa dalam mendukung kemajuan pembangunan di Desa;
4. Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Desa;
5. Kurang harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD;
6. Belum optimalnya monitoring dan pengawasan dari Kecamatan terkait pengelolaan keuangan Desa; dan
7. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan terkait pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara Pemerintah Desa, Kecamatan dan DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENJA

Berdasarkan Rancangan awal RKPD 2025 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:.

Tabel. 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.156.282.254					12.769.198.987	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		7.018.984.697	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.914.300.114	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		8.925.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		8.925.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	8.925.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	8.925.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		5.339.324.799	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		6.421.525.856	
4	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	5.336.824.799	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	6.418.686.918	adanya penambahan pegawai PNS maupun PPPK, dan Kenalkan untuk pembayaran BPJS kesehatan Kepala Desa
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2.838.938	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		77.490.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		182.514.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 paket	30.954.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 paket	30.954.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	46.536.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	151.560.000	Banyaknya pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh daerah maupun pusat yang wajib untuk diikuti oleh SKPD
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan		511.099.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan		1.193.071.708	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.343.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.583.158	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8000 paket	24.974.950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.000 paket	30.318.750	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000 dokumen	15.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.600 dokumen	16.669.800	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
13	Penyediaan Bahan Material	DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	58.207.500	Penyediaan Bahan Material	DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	16.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	43.560.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	100.000.000	Berdasarkan evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya, pagu sub kegiatan pada rancangan awal belum dapat memenuhi secara maksimal kegiatan yg ada
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	366.174.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	1.027.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.156.282.254					12.769.198.987	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		7.018.984.697	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.914.300.114	
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		95.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		488.873.500	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	350.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
18	Pengadaan Mebel	DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12.000.000	Pengadaan Mebel	DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	80.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	53.400.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	58.873.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		724.715.448	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		979.961.250	
22	Penyediaan Surat Menyurat	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	2.595.000	Penyediaan Surat Menyurat	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	4.961.250	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
23	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	100.468.800	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	220.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	621.651.648	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	755.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		262.030.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		639.428.800	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	13.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	45.963.225	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25unit	139.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25unit	470.000.000	Bertambahnya jumlah unit kendaraan yang dipelihara dan adanya kenaikan untuk harga bahan bakar minyak
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	65.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	22.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	29.921.850	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	25.890.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	28.543.725	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.156.282.254					12.769.198.987	
31	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan		58.740.675	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan		58.740.675	
32	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Kotim	Persentase desa yang telah dilakukan penataan		58.740.675	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Kotim	Persentase desa yang telah dilakukan penataan		58.740.675	
33	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	26.250.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	26.250.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
34	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	10.440.675	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	10.440.675	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
35	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	55 Desa		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	55 Desa		Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
36	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Desa	22.050.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Desa	22.050.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
37	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama		-	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama		22.000.000	
38	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan		-	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan		22.000.000	
39	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 dokumen	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 dokumen	11.000.000	karena tidak tersedianya pagu ditahun tersebut
40	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 dokumen	-	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 dokumen	11.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
41	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.955.919.907	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	
42	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.955.919.907	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	
43	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	168 dokumen	11.050.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	168 dokumen	27.639.785	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
44	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 dokumen	16.577.500	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 dokumen	125.290.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	168 dokumen	23.445.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	168 dokumen	78.630.300	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.156.282.254					12.769.198.987	
41	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.955.919.907	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	
42	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.955.919.907	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	168 dokumen	112.009.900	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	168 dokumen	137.093.229	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
47	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Kotim	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	27.835.800	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Kotim	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	77.030.132	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
48	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 dokumen	22.008.100	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 dokumen	60.928.285	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
49	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77 laporan	1.574.564.907	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77 laporan	300.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
50	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 laporan		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 laporan	17.915.625	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Profil Desa	168 dokumen	20.185.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Profil Desa	168 dokumen	27.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
52	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Kotim	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	168 dokumen	33.815.200	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Kotim	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	168 dokumen	50.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
53	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Kotim	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	28.508.500	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Kotim	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	28.508.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
54	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	16.250.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	66.250.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
55	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	168 laporan	12.220.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	168 laporan	12.220.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
56	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	57.450.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	220.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.156.282.254					12.769.198.987	
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan		1.122.636.975	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan		1.545.152.342	
58	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi		1.122.636.975	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi		1.545.152.342	
59	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	168 dokumen	55.125.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	168 dokumen	52.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
60	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	142.647.300	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	252.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
61	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 dokumen	62.043.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 dokumen	68.389.067	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
62	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	44.492.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	113.032.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
63	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	134.248.400	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	375.150.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
64	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	203 dokumen	684.080.775	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	203 dokumen	684.080.775	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan



Pada Tahun 2025 terdapat beberapa kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan pada tahun 2025 serta program kegiatan yang mendukung langsung pada sasaran dan indikator kinerja daerah yaitu **“Meningkatnya Kemandirian Desa”** dengan indikator **“Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM”**. Adapun program dan kegiatan yang mendukung langsung sasaran dan indikator tersebut antara lain:

1. Program administrasi pemerintahan desa, dengan kegiatan:
 - Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
 - Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
 - Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - Fasilitasi Penyusunan profil desa
2. Program penataan desa, dengan kegiatan:
 - Fasilitasi tata wilayah desa.
3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, dengan kegiatan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat
 - Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Dengan telah di analisisnya kebutuhan pagu dengan pagu rancangan awal pada tabel di atas diharapkan kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan pagu yang telah menyesuaikan kebutuhan dana pada masing-masing kegiatan. Jika kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal maka akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja DPMD. Di sisi lain apabila suatu kegiatan berlebihan dalam penganggaran dapat berdampak pada jumlah serapan anggaran yang tidak maksimal sehingga mempengaruhi pada efisiensi belanja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD) DPMD Kab. Kotim, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 juga mengakomodasi usulan dari masyarakat melalui tahapan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik dilanjutkan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten yang sebelumnya di bahas dalam forum SKPD. Musrenbang tingkat kabupaten merupakan pembahasan awal mengenai usulan program/kegiatan yang masuk dari kecamatan serta masukan dari stakeholder terkait sehingga didapatkan program dan kegiatan prioritas kabupaten yang kemudian ditetapkan dan direalisasikan melalui APBD Kab. Kotim. Adapun rincian usulan program dan kegiatan TA. 2025 dari masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok fungsi DPMD dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kab. Kotawaringin Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bangkuang Makmur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	40 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pelangsian	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sawahen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	50 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tanah Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Handil Sohor	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Samuda Besar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	35 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Sei Ijum Raya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jemaras	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Luwuk Bunter	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Luwuk Ranggan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Patai	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	7 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Brubung Buyung	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Sungai Paring	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terantang Hilir	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	7 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bapinang Hilir	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
16	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bapinang Hulu	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
17	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bapinang Hulu	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
18	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bapinang Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
19	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Hantipan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
20	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Hantipan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
21	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rawa Sari	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	9 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
22	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rawa Sari	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
23	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rawa Sari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30 orang	Usulan Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan tabel di atas seluruh usulan merupakan kewenangan DPMD Kab. Kotim yaitu pembinaan atau pelatihan aparatur dan BPD, pembinaan/pelatihan Bumdes, pembinaan/pelatihan PKK, pembinaan/pelatihan pasar desa, dan pembinaan/pelatihan lembaga kemasyarakatan desa



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam RPJM Nasional atau Rencana Strategis Nasional telah ditetapkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun 4 (empat) pilar yang dimaksud antara lain:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sedangkan 7 agenda pembangunan yang menjadi fokus utama untuk mencapai 4 (empat) pilar di atas yaitu:



- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 agenda pembangunan yang telah diuraikan di atas, pada poin b yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan”.

Isu strategis utamanya adalah masih adanya kesenjangan antar wilayah yang ditandai salah satunya keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi. Upaya memperkecil ketimpangan antardaerah dengan program aksi melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan dengan program aksi.

Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan, serta langkah yang diambil yaitu :

1. Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa.
2. Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, terutama digerakkan oleh BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/ Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di perdesaan.
3. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal dengan mempromosikan produk unggulan yang berbasis sumber daya ekonomi lokal
4. Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga lebih adaptif untuk melakukan inovasi, partisipatifinklusif, transparan, serta akuntabel.
5. Memperkuat fungsi pendamping desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri.

Penyusunan rencana kerja DPMD Kab. Kotim ini berpedoman pada rencana strategis DPMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 sehingga dapat dikatakan bahwa renja DPMD Kab. Kotim bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional seperti RPJP Nasional, RPJMN 2005-2025, RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim Tahun 2025 ini agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja 2025 ini DPMD Kab. Kotim mampu berkarya dan berkembang dalam meningkatkan kinerjanya pada tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa tidak ada lagi visi dan misi SOPD, maka penyusunan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Demi mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Tindakan nyata dalam beberapa misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)”

Dalam rangka mencapai Misi Kabupaten Kotawaringin Timur diatas, maka perlu menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai SOPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, telah menetapkan tujuan dan organisasi. Adapun untuk rincian indikator dan target kinerja dari



masing-masing tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2025 seperti yang tertuang pada Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun (%)
				2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan		Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM	8,00
		Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	6,55
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00
		Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	100,00
			Persentase LPM Berprestasi	0,54
			Persentase Posyandu Aktif	55,00
			Persentase PKK Aktif	100,00
			Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,50
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00
2	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	22,30
		Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Persentase BUMDes Aktif	57,14
			Persentase Pasar Desa Aktif	100,00
3	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah		Nilai Sakip	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00



3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yakni **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”**.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)”** dengan sasaran strategis daerah yaitu meningkatnya kemandirian desa, maka disusun program dan kegiatan di tahun 2025 untuk menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis tersebut

2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goal's (SDG's)*.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;



- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.

Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten melalui DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

3. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan.

Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam merumuskan perencanaan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya, dalam hal ini meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengembangan ekonomi Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
5. Pengembangan daerah terisolir, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Untuk itu pada tahun 2025



diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Dalam Renja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dengan lokasi kegiatan tersebar di 17 kecamatan dan 168 desa yang ada Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pagu indikatif renja DPMD tahun 2025 sebesar Rp.7.212.811.247-, yang bersumber dari dana transfer umum-dana, alokasi umum, dana bagi hasil, dana transfer antar daerah (Provinsi) dan pendapatan asli daerah (PAD) Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode					Urusan Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 7.212.811.247				Rp 10.156.282.254
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			Rp 6.462.811.247				Rp 7.018.984.697
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			Rp -				Rp 8.925.000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	15 Laporan		APBD Kotim		15 Dokumen	Rp 8.925.000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			Rp 3.982.564.051				Rp 5.339.324.799
2	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	80 orang/bulan	Rp 3.982.564.051	APBD Kotim		30 orang	Rp 5.336.824.799
2	13	01	2.02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	1 laporan	Rp -	APBD Kotim		1 dokumen	Rp 2.500.000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			Rp 151.560.000				Rp 77.490.000
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMD	45 paket		APBD Kotim		43 paket	Rp 30.954.000
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	40 orang	Rp 151.560.000	APBD Kotim		16 orang	Rp 46.536.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 7.212.811.247				Rp 10.156.282.254
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			Rp 6.462.811.247				Rp 7.018.984.697
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			Rp 932.423.666				Rp 511.099.450
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMD	4 paket	Rp 4.820.000	APBD Kotim		4 paket	Rp 2.343.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMD	8.000 paket	Rp 33.594.400	APBD Kotim		8.000 paket	Rp 24.974.950
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMD	3.600 dokumen	Rp 16.200.000	APBD Kotim		3.600 dokumen	Rp 15.840.000
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPMD	4 paket	Rp 109.169.266	APBD Kotim		4 paket	Rp 58.207.500
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	46 laporan	Rp 200.900.000	APBD Kotim		12 laporan	Rp 43.560.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	400 laporan	Rp 567.740.000	APBD Kotim		400 laporan	Rp 366.174.000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			Rp -				Rp 95.400.000
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMD	1 unit	Rp -	APBD Kotim		1 unit	Rp 30.000.000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMD	2 Unit	Rp -	APBD Kotim		2 Unit	Rp 12.000.000
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMD		Rp -	APBD Kotim			
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMD	9 unit	Rp -	APBD Kotim		9 unit	Rp 53.400.000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			Rp 781.391.980				Rp 724.715.448
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	1500 laporan	Rp 4.000.000	APBD Kotim		1500 laporan	Rp 2.595.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMD	12 laporan	Rp 137.681.184	APBD Kotim		4 laporan	Rp 100.468.800
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMD	180 laporan	Rp 639.710.796	APBD Kotim		26 laporan	Rp 621.651.648

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode	Urusan Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 13	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							Rp 7.212.811.247				Rp 10.156.282.254
2 13 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi			Rp 6.462.811.247				Rp 7.018.984.697
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur			Rp 614.871.550				Rp 262.030.000
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMD	31 unit	Rp 22.200.000	APBD Kotim		20 unit	Rp 13.800.000
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMD	31 unit	Rp 466.221.900	APBD Kotim		25unit	Rp 139.460.000
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	5 unit	Rp 78.120.000	APBD Kotim		5 unit	Rp 60.000.000
2 13 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	25 unit	Rp 28.400.000	APBD Kotim		25 unit	Rp 22.880.000
2 13 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMD	25 unit	Rp 19.929.650	APBD Kotim		25 unit	Rp 25.890.000
2 13 2	Program Penataan Desa				Presentase desa yang terselesaikan tata batas wilayahnya			Rp -				Rp 58.740.675
2 13 2 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				Presentase desa yang terselesaikan tata batas wilayahnya			Rp -				Rp 58.740.675
2 13 2 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa				Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Kotim	1 Desa	Rp -	APBD Kotim		1 Desa	Rp 26.250.000
2 13 2 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Kotim	20 Desa	Rp -	APBD Kotim		20 Desa	Rp 10.440.675
2 13 2 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Kotim	55 Desa	Rp -	APBD Kotim			
2 13 2 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Kotim	1 Desa	Rp -	APBD Kotim		1 desa	Rp 22.050.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode	Urusan Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp 7.212.811.247				Rp 10.156.282.254
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase desa yang melakukan kerjasama terhadap total desa		Rp -				Rp -
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Presentase desa yang melakukan kerjasama terhadap total desa		Rp -				Rp -
2	13	3	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	17 dokumen	Rp -	APBD Kotim		Rp -
2	13	3	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	10 dokumen	Rp -	APBD Kotim		Rp -
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan		Rp -				Rp 1.955.919.907
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan dokumen administrasi desa yang sesuai ketentuan		Rp -				Rp 1.955.919.907
2	13	4	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim	168 dokumen	Rp 11.050.000
2	13	4	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kotim	2 dokumen	Rp -	APBD Kotim	2 dokumen	Rp 16.577.500
2	13	4	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim	168 dokumen	Rp 23.445.000
2	13	4	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim	168 dokumen	Rp 112.009.900
2	13	4	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kotim	200 Orang	Rp -	APBD Kotim	200 Orang	Rp 27.835.800
2	13	4	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Kotim	5 dokumen	Rp -	APBD Kotim	5 dokumen	Rp 22.008.100
2	13	4	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Kotim	77 laporan	Rp -	APBD Kotim	77 laporan	Rp 1.574.564.907
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kotim	10 laporan	Rp -	APBD Kotim		Rp -
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim	168 dokumen	Rp 20.185.000
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim	168 dokumen	Rp 33.815.200
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kotim	50 Orang	Rp -	APBD Kotim	50 Orang	Rp 28.508.500
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kotim	10 Desa	Rp -	APBD Kotim	10 Desa	Rp 16.250.000
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Kepala Desa	Kab. Kotim	168 laporan	Rp -	APBD Kotim	168 laporan	Rp 12.220.000
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kotim	1 dokumen	Rp -	APBD Kotim	1 dokumen	Rp 57.450.000

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp 7.212.811.247					Rp 10.156.282.254	
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan			Rp 750.000.000				Rp 1.122.636.975	
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif			Rp 750.000.000				Rp 1.122.636.975	
2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kotim	168 dokumen	Rp -	APBD Kotim		168 dokumen	Rp 55.125.000	
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kotim	5 lembaga	Rp -	APBD Kotim		5 lembaga	Rp 142.647.300	
2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kotim	20 dokumen	Rp -	APBD Kotim		20 dokumen	Rp 62.043.500	
2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Kotim	1 laporan	Rp -	APBD Kotim		1 laporan	Rp 44.492.000	
2	13	5	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kotim	1 laporan	Rp -	APBD Kotim		1 laporan	Rp 134.248.400	
2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kotim	203 dokumen	Rp 750.000.000	APBD Kotim		203 dokumen	Rp 684.080.775,00	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum tahun 2025. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar kualitas laporan keuangan Dapat meningkat. Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini ditetapkan dengan maksud agar meningkatkan kualitas aparatur dan laporan keuangan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar meminimalisir pelanggaran disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur peraturan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan kepegawaian sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai di DPMD Kab. Kotim. Pada program ini hanya terdapat kegiatan dua kegiatan yaitu:



- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyediaan Bahan/Material
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal Pengadaan Barang penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan adanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta



sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran.

Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Penataan Desa

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan penataan desa dapat berjalan maksimal dan sistematis. Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu

- 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- 2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

3 Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Program kerja ini ditetapkan untuk memberi fasilitasi kemudahan antar desa maupun pihak ketiga agar dapat saling bekerjasama. Pada program ini hanya terdapat dua kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

4 Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam hal pelatihan maupun fasilitasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Desa
- 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD



- 6) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 7) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 8) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
- 9) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 10) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 12) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 13) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :



TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 20255 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.212.811.247,00							10.279.450.416,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.212.811.247,00							10.279.450.416,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.212.811.247,00							10.279.450.416,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.462.811.247,00						-	8.317.440.415,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	-			100 persen	0,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	10.848.393,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		10.848.393,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.982.564.051,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	6.041.240.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.982.564.051,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		6.038.110.294,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		3.129.929,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	151.560.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	37.624.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		37.624.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	151.560.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 persen	932.423.666,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	918.981.799,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.820.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		2.847.931,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8000 Paket	33.594.400,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		33.426.422,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3600 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		18.378.455,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	109.169.266,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		293.162.604,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	200.900.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		56.885.693,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	567.740.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		514.280.694,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	-			100 persen	0,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	201.908.034,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pelangsian	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		64.908.034,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 persen	781.391.980,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	796.134.752,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pelangsian	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		5.469.778,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	137.681.184,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				180 Laporan	639.710.796,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		790.664.974,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	-			100 persen	614.871.550,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	310.702.434,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	22.200.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		50.674.456,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	466.221.900,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		130.569.681,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	78.120.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	28.400.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		32.988.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	19.929.650,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		31.469.457,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	137.681.184,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				180 Laporan	639.710.796,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		790.664.974,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	-			100 persen	614.871.550,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	310.702.434,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	22.200.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		50.674.456,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	466.221.900,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		130.569.681,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	78.120.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	28.400.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		32.988.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	19.929.650,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		31.469.457,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	0,00						-	64.456.005,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	0,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	64.456.005,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		28.940.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				168 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		11.510.884,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				0 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				0 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		24.004.496,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	0,00						-	65.910.827,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	0,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	65.910.827,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		84.925.720,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				168 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				168 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				20 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		67.173.434,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				77 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		32.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				10 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		19.751.997,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				168 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		26.546.657,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				168 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		43.815.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		38.508.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				168 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		36.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		32.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		61.383.066,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	750.000.000,00						-	1.278.128.009,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.278.128.009,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				168 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				168 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		57.881.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		173.388.685,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				20 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		75.398.947,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		54.080.304,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		163.179.769,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				203 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		754.199.054,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	J U M L A H							7.212.811.247,00								10.279.450.416,00		



BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan rencana kerja yang disusun akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari DPMD itu sendiri, instansi terkait (terutama Kecamatan dan Desa) dan partisipasi aktif masyarakat. untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMD kabupaten kotawaringin timur Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), berdasarkan pagu indikatif renja 2025 , tidak semua program dan kegiatan dapat terpenuhi anggarannya, hanya kegiatan rutin yang dapat terpenuhi anggaran untuk kegiatan bidang belum dapat dipenuhi berdasarkan pagu indikatif renja 2025.

Penyusunan Renja Tahun 2025 DPMD memperhatikan keselesaran antara program dan target yang akan dilaksanakan yaitu berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2023 dengan pertimbangan diantaranya (1) penyusunan anggaran dan kinerja harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi DPMD, (2) penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dan (3) perlu adanya saling koordinasi antara DPMD Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Inspektorat Daerah terutama terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 memperhatikan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai; dan
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.



Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan semakin berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Renja Dinas PMD kab. Kotawaringin Timur Tahun 2025 yaitu Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa. Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) pada Renja 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat,seminar,workshop,in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Renja mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu menjembatani



antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Adanya Renja 2025 ini diharapkan agar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.



Sampit, Juli 2024

Kepala Dinas,

RAIHANSYAH, SH., M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19750406 199902 1 001



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0407/Huk-BAPPERIDA/2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2025**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 35);
34. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;
31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan ;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu; dan
48. Kecamatan Telaga Antang.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 18 Juli 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD
HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PINAR SEMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012

**Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 050/092/Bapperida-I/2024
tanggal 15 Februari 2024 Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan
Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.**

Penyajian Rencana Kerja Perangkat sistematisa paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja-perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan, sasaran perangkat daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
- e. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah; dan
- f. Penutup.